

BAB IV

REAKSI ATAU RESPON PARTAI POLITIK DAN MASYARAKAT

TERHADAP KEBIJAKAN K.H. ABDURRAHMAN WAHID

A. Reaksi Partai Politik

Selama K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat melalui pemilihan tertutup yang demokratis. Banyak kebijakan-kebijakan Presiden yang dianggap *nyleneh* oleh beberapa kalangan partai politik dan di respon secara politis yang mengakibatkan K.H. Abdurrahman Wahid lengser dari kursi kePresidenan. Misalnya ide pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan penyebaran komunisme-marxisme-leninisme, membuka hubungan dagang dengan Israel, dan sampai pada bongkar pasang kabinet. Apa yang dilakukan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dalam kebijakan-kebijakan itu, tidak lain adalah ingin mencita-citakan negaranya sebagai Negara yang demokratis atau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia.

Diantara kelebihan Presiden keempat Republik Indonesia, K.H. Abdurrahman Wahid, adalah kelincahannya melempar isu. K.H. Abdurrahman Wahid selalu siap dengan komentar dan pernyataan di hampir setiap kesempatan,

baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kadang komentar dan pernyataan itu terasa orisinal, segar, cerdas, dan kadang juga membingungkan.

“K.H. Abdurrahman Wahid memang gudangnya isu,” begitu tanggapan seorang anggota DPR-RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Muhaimin Iskandar.¹ Sebagai “Gudangnya isu”, pernyataan K.H. Abdurrahman Wahid bisa meluncur kapan saja, dimana saja, tak terkecuali di mancanegara. Dalam waktu singkat, pernyataan itu lalu menyebar lewat media cetak dan elektronik yang menimbulkan berbagai reaksi.

Tapi itulah sebagian pernyataan yang membangkitkan kontroversi tidak jarang berkepanjangan. Misalnya rencana membuka hubungan dagang dengan Israel, usul penghapusan Tap MPRS No. 25/1966, sampai pencopotan Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi dari jabatan Menteri.

Penghapusan Tap MPRS No. 25/1966 yang dilakukan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid telah mendapat reaksi positif dari kalangan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang menyatakan setuju pencabutan itu dilakukan dengan alasan bahwa demokrasi memberi kesempatan kepada ideologi apa saja untuk berkembang. Sedangkan sebagian besar pihak lain (kontra) menyatakan keberatan

¹*Gatra*, 24 Juni 2000, Hal. 24

terhadap pencabutan ketetapan itu dan berargumen bahwa K.H. Abdurrahman Wahid akan membangkitkan kembali PKI (Partai Komunis Indonesia).²

Sementara dari kalangan partai politik lain, gagasan tersebut malahan mendapat tentangan keras dari mana-mana, termasuk dari Ketua umum Partai Amanat Nasional, yang juga sebagai ketua MPR, Amien Rais secara tegas menyatakan komunisme tidak punya hak hidup lagi di Indonesia. Jadi, biar bagaimanapun Tap itu tidak bakal di cabut. Dan Fraksi Bulan Bintang (F-BB) lebih keras lagi. Hamdan Zoelva, Sekretaris Fraksi Bulan Bintang mengatakan, sebagai Presiden tidak pada tempatnya K.H. Abdurrahman Wahid mengusulkan Tap. Sebaliknya, sebagai mandataris MPR, Ia justru harus melaksanakan amanat dan mandat MPR. Karena itu, Fraksi Bulan Bintang, kata Hamdan, akan terus memantau dengan seksama apakah K.H. Abdurrahman Wahid sudah melanggar Tap.³

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung menilai ide K.H. Abdurrahman Wahid tentang pencabutan Tap MPRS Nomor XXV/1966 itu bertentangan dengan hati nurani masyarakat Indonesia yang masih trauma atas kekejaman PKI. Akbar kemudian malah menyepelekan ide pencabutan tap MPRS itu, sebaiknya perhatian Presiden lebih difokuskan pada pembenahan bidang

²*Ibid*, Hal. 33

³*Panji masyarakat No. 01 Tahun IV*, 26 April 2000, Hal 55

ekonomi.⁴ Reaksi yang juga tak kalah kerasnya datang dari AM Fatwa, ketua DPP PAN : “kapasitas K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden tidak layak melontarkan gagasan menghapus Tap MPRS. Sebaliknya seorang Presiden harus mengamankan dan menjalankan ketetapan MPR yang dihasilkan MPR, termasuk Tap MPRS XXV/1966 soal larangan ajaran komusisme, leninisme, marxisme.”⁵

Yang paling membikin kesal para penentang K.H. Abdurrahman Wahid, ialah permintaan maaf yang disampaikan K.H. Abdurrahman Wahid terhadap PKI, karena di tahun 1965/1966 ada sementara orang NU yang membunuh orang yang di sangka PKI. Menanggapi hal itu, Amien Rais mengatakan para pengikut ajaran komunis tidak boleh di beri kesempatan membuat partai baru, karena mereka akan mengubah demokrasi itu sendiri.

Sejak K.H. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden dan telah melewati tiga bulan masa pemerintahannya, ketegangan Presiden dan DPR-MPR lama kelamaan telah mengalami hubungan yang tidak harmonis. Ini ditandai dengan pencopotan beberapa menteri dan bongkar pasang kabinet yang dilakukan pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid.

Nampaknya “ jurus dewa mabuk” yang dimainkan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dalam mengelola Negara, makin sulit di tebak. Langkah

⁴Iskandar, Muhaimin, *Gus Dur Yang Saya Kenal ; Sebuah Catatan Transisi Demokrasi Kita*, Cet. I, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2004, Hal.33

⁵*Ibid*, Hal. 33

terakhirnya mencopot Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Laksamana Sukardi (PDI-P) serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Jusuf Kalla (Golkar) makin menunjukkan betapa sulitnya memahami “gerakan silat” politik yang dilakukan K.H. Abdurrahman Wahid. Semula K.H. Abdurrahman Wahid hanya mengatakan bahwa pergantian itu hak prerogatif Presiden, tapi saat “diadili” DPR ia mengatakan bahwa keduanya terlibat Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Karena itu, para elit partai pun berang, bahkan Golkar dan PDI Perjuangan mengancam akan menarik orang-orangnya dari Kabinet Persatuan Nasional. Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid pun terancam jika PDIP bersatu dengan Golkar dan poros tengah, tamatlah riwayat K.H. Abdurrahman Wahid. Itulah perkataan pengamat politik, Arief Budiman.⁶

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab III, tentang kebijakan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dalam membubarkan Departemen Penerangan (Deppen) dan Departemen Sosial (Depsos), Dalam penjelasan yang diberikan secara terbuka pada sidang paripurna DPR, pada pertengahan November 1999, K.H. Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa penghapusan itu dilakukan semata-mata untuk efisiensi dan perampingan kabinet pemerintahan, sekaligus dalam rangka implementasi sepenuhnya UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah (Otonoda). Perampingan kabinet yang dilakukan pemerintahan K.H. Abdurrahman

⁶*Forum Keadilan*, No. 05, 7 Mei 2000, Hal. 86

Wahid harus benar-benar berdasarkan fungsi. Ketika K.H. Abdurrahman Wahid diwawancarai ia mengatakan, bahwa kabinet yang kemarin itu banyak sekali yang *overlap*. Jadi yang tidak perlu, sekarang di tinggal.⁷

Sejumlah kalangan menilai pembubaran Deppen adalah kebijakan yang prematur, yang di ambil tanpa melihat fakta bahwa masyarakat belum siap benar menerima kehadiran pers yang terlalu bebas sebagai implikasi dari pembubaran institusi ini. Kehadiran Depsos juga memiliki substansi yang sama dengan Deppen, yakni Depsos lebih banyak menjadi penghalang tumbuhnya *civil society* yang kuat.

Kebijakan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dalam membubarkan kedua institusi itu di respon kalangan politisasi dengan melakukan demonstrasi di Istana Negara yang melibatkan para penyandang cacat yang memang sengaja dikerahkan untuk merebut simpati publik agar Depsos kembali dihidupkan kembali oleh pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid.⁸

Dalam kebijakan ini, Muhaimin Iskandar menyangkal ide yang dikeluarkan sejumlah kalangan yang menolak terhadap kebijakan K.H. Abdurrahman Wahid karena dia mengamati dan percaya bahwa masyarakat luas pada dasarnya memiliki kesiapan untuk berubah dan menerima perubahan apapun

⁷*Tempo*, 27 Agustus 2000, Hal. 30

⁸Iskandar, Muhaimin, *Gus Dur Yang Saya Kenal ; Sebuah Catatan Transisi Demokrasi Kita*, Cet. I, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2004., Hal. 12

bentuknya, pembubaran Depsos merupakan ikhtiar serius dalam rangka memberikan kekuasaan yang luas kepada rakyat untuk mengembangkan secara mandiri program-program sosialnya tanpa harus menggantungkan kepada pemerintah untuk melakukan pelayanan sosial.⁹ Dan penolakan yang dilakukan para pimpinan dan pegawai kedua institusi ini lebih menggambarkan ketakutan mereka, karena akan kehilangan pekerjaannya.

Dari berbagai kasus ini, tidak aneh kalau kemudian muncul keraguan akan masalah kesehatan K.H. Abdurrahman Wahid. Dalam hal ini adalah tokoh Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga menjadi ketua MPR-RI, Amien Rais, yang meminta K.H. Abdurrahman Wahid untuk memeriksakan dirinya ke dokter Psikiater, bahkan Amien malah bicara lebih rinci. Tim dokter itu, katanya, harus benar-benar mandiri. “kalau memang bagus, katakan bagus dan kalau lemah, katakan lemah,” katanya. Bahkan Agung Laksono, Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, melemparkan ide tentang membentuk tim dokter independen, khusus untuk memeriksa kondisi kesehatan K.H. Abdurrahman Wahid.

Memang K.H. Abdurrahman Wahid pernah terkena *stroke* dua kali. Yang terakhir Januari 1998, ketika ia mendadak pingsan dalam posisi terduduk di kloset

⁹*Ibid*, Hal. 13

kamar mandi kantor PBNU (Pengurus Besar Nahdhatul Ulama) di Jalan Kramat Raya, Jakarta dan Ia segera dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.¹⁰

Jadi latar belakang ide Agung Laksono agar K.H. Abdurrahman Wahid harus diperiksa. Ketika diwawacarai salah satu media percetakan, *Gatra*, Rohmat Haryadi menemui Agung Laksono di rumahnya, Jakarta Timur. ia mengatakan :¹¹

“Ketika terpilih menjadi Presiden, K.H. Abdurrahman Wahid mengatakan “kita harus menghormati Mbak Mega yang tidak mempersoalkan sakit saya.” Jadi pada pengakuan bahwa beliau tidak sehat. Pada perkembangan berikutnya, beliau sering *check up* di luar negeri. Tapi, di saat yang bersamaan, tetap saja muncul ucapan kontroversial, tidak konsisten, dan melompat-lompat. Lantas timbul dugaan, jangan-jangan akibat *stroke* tempo hari. Tapi ada yang membanth, “oh tidak, memang itu kecanggihan beliau memainkan peran sehingga sulit di baca.” Nah, untuk meredam semua itu, alangkah baiknya umumkan kesehatan beliau secara resmi.”

¹⁰*Ibid*, Hal 27

¹¹*Gatra*, 24 Juni, 2000, Hal 31

B. Reaksi Masyarakat

Tampilnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden, memiliki legitimasi yang kuat. Hal ini ditandai dengan sedikitnya empat faktor, yaitu :¹²

1. Secara materiil, pemerintahannya adalah hasil pemilu 1999 yang terbilang relatif demokratis.
2. Legitimasi pemerintahannya diperoleh dari dimensi-dimensi simbolis dia sebagai politisi yang memiliki kharisma luar biasa di masa pendukungnya.
3. Secara psikopolitik, pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai pemerintahan baru, bersentuhan dengan ekspektasi publik yang menginginkan perubahan.
4. Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid menjanjikan perbaikan mendasar terhadap kondisi materiil masyarakat yang di dera kemiskinan akibat krisis ekonomi.

Dalam perjalanan pemerintahannya, tidak dapat dipungkiri bahwa K.H. Abdurrahman Wahid banyak melakukan tindakan yang menimbulkan kontroversi dalam masyarakat, misalnya permintaan maaf dia kepada korban PKI. Ini menunjukkan ketidakpekaannya terhadap masalah psikologis yang dirasakan

¹²*Panji masyarakat*, No. 01 Tahun IV, 26 April 2000, Hal. 27

bangsa kita. Bahkan ketua umum PBNU, K.H. Hasyim Muzadi, telah mencoba mengingatkan K.H. Abdurrahman Wahid agar tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan. Bahkan dari “forum langitan”, sebuah forum tempat berkumpulnya Kiai NU yang menjadi referensi K.H. Abdurrahman Wahid ini turut menegur.¹³ Peringatan tersebut mungkin bisa dipahami dari keinginan menjaga K.H. Abdurrahman Wahid agar tidak terjebak oleh ucapan-ucapannya sendiri.

Menyikapi berbagai pernyataan kontroversial Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, dikalangan NU sendiri juga terjadi pro dan kontra. Misalnya mengenai gagasan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid untuk mencabut Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme. K.H. Hasyim Muzadi, Ketua umum PBNU tersebut membuktikan bahwa K.H. Abdurrahman Wahid itu milik bangsa, bukan milik NU semata. Ungkapnya, “Abdurrahman Wahid dalam hal ini berkapasitas sebagai Presiden dan dia merasa sebagai Presiden bagi semua golongan termasuk pemilihnya yang dulunya PKI”.¹⁴ Hal senada juga diungkapkan oleh K.H. Said Agil Siradj, Wakil Ra’is ‘Am Syuriah NU, “Abdurrahman Wahid hanya memberi peluang untuk meninjau kembali Tap MPRS yang dulu di susun atas dasar emosional dan alasan yang signifikan.

¹³*Ibid*, Hal. 56

¹⁴Ulum, Bahrul, “*Bodohnya NU*” Apa “*NU Dibodohi*”, *Jejak Langkah NU Era Reformasi; Menguji Khittah Meneropong Paradigma Politik*, Cet. April, Yogyakarta:Ar-Ruzz, 2003, Hal.189.

Namun tidak semua kalangan NU mendukung gagasan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid tersebut. K.H. Yusuf Hasyim adalah salah satu tokoh NU yang menentang gagasan pencabutan Tap MPRS No. 25 Tahun 1966. selain itu, sikap kritis dan bijaksana ditujukan oleh Salahudin Wahid. Menurutnya, “Sebenarnya memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada warga keturunan dan simpatisme PKI tidak perlu harus mencabut Ketetapan MPRS No. XXV/1966. bagi pribadinya sah-sah saja bila ada kalangan yang menginginkan pencabutan ketetapan MPRS itu dan sah-sah pula bila ada kalangan yang ingin mempertahankannya masing-masing punya argumentasi. Jadi tidak usah saling memaki, saling menuding”.¹⁵

Rencana Presiden K.H. Abdurrahman Wahid yang hendak membuka dagang dengan dengan Israel, ternyata di respon oleh kalangan Islam militan. Pandangan mereka yang formal-legalistik telah menutup *visibility* keuntungan ekonomi dari hubungan dagang ini. Keterikatan mereka dengan literer teks al-Qur’an yang secara lahiriah mendiskreditkan kaum yahudi telah pula menghalangi mereka untuk mengetahui dengan persis pandangan Islam terhadap komunitas non-muslim. Berbagai organisasi militan mereka berfungsi menjadi alat untuk melakukan perlawanan terhadap rencana pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid.

¹⁵*Ibid*, Hal. 190

Kelompok militan ini tidak hanya melakukan unjuk rasa untuk menolak rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel. Mereka juga memprotes pola penanganan pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid atas konflik antara komunitas muslim dan Kristen di Maluku. Mereka menuduh adanya keberpihakan pemerintah terhadap kelompok agama lain. Perlawanan mereka tercermin pada pengerahan massa Siaga Aksi Sejuta Ummat tanggal 7 Januari 2000 di Monas. Mobilisasi massa tersebut merefleksikan terjadinya pergeseran ideologi politik Islam. Dalam orasinya, ketua panitia aksi monas menyatakan hendak mendirikan Negara Islam. Beberapa tokoh yang di anggap dekat dengan kelompok Islam militan waktu itu, adalah Achmad Soemargono, Didin Hafifuddin sampai Amien Rais dan Hamzah Haz hadir dalam unjuk rasa ini. Semua tokoh tadi menyampaikan ancamannya pada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, bila yang disebutkan terakhir tadi ktidak segera menunjukkan kemampuannya meredam konflik di Maluku.¹⁶

Nampaknya Amien Rais yang mantan ketua umum Muhammadiyah itu sedang terjebak ke dalam paradigma militan yang dikembangkan oleh Islam militan, akhirnya Amien Rais sendiri telah menyesali keikutsartaannya dalam pengerahan massa di monas. Dalam sebuah pernyataanya, Amien tidak hanya menghimbau masyarakat untuk menghindari terjadinya pengerahan massa lagi,

¹⁶Hamim, Thoha, *Islam Dan NU Di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer [Dialektika Kehidupan Politik, Agama, Pendidikan Dan Sosial Masyarakat Muslim]*, Cet. I, Surabaya : Diantama, 2004, Hal. 65.

tetapi juga meminta Warga Muhammadiyah untuk tidak ikut dalam aksi demonstrasi.¹⁷

Aksi sejuta ummat merupakan awal dari scenario besar perlawanan eksponen anti K.H. Abdurrahman Wahid. Mereka memandang K.H. Abdurrahman Wahid sebagai rival politik yang harus dirintangi dengan bermacam gangguan. Mereka sangat gigih dalam melakukan aksinya sampai pada tingkat pembunuhan karakter. Perlawanan ini memang sangat disayangkan, karena pelakunya justru dari kalangan muslim sendiri. Dalam berbagai aksinya, Islam militan mendapatkan dukungan penuh dari mereka. Gerakan perlawanan tersebut mendapatkan momentumnya, setelah berhasil menarik kaum nasionalis pendukung Megawati ke dalam barisan mereka sampai ia berhasil melengserkan K.H. Abdurrahman Wahid dari kursi kePresidenan dan memilih Megawati menjadi Presiden melalui sidang istimewa MPR 23 Juli 2001.

Lengsernya K.H. Abdurrahman Wahid menjadi sesuatu yang niscaya, karena kaum oposan telah mengerahkan segala daya, kemampuannya untuk merealisir agenda pelengseran tersebut. Pada saat K.H. Abdurrahman Wahid memegang jabatan Presiden, bermacam upaya penjegalan adalah bagian dari realitas kesehariannya. Selama dia memerintah, tidak pernah ada hari berlalu tanpa hujatan dan fitnahan yang dirancang juntut merusak nama baik K.H.

¹⁷ *Ibid*, Hal. 70

Abdurrahman Wahid serta mendegradasikan legitimasi pemerintahnya diarahkan sebagai instrumen pembunuhan terhadap karakter mantan ketua umum PBNU.

Perlu dicatat bahwa dengan kekuatan dananya kelompok anti-K.H. Abdurrahman Wahid yang selalu membiayai berbagai aksi demo memang berhasil menciptakan opini publik negatif tentang K.H. Abdurrahman Wahid. Milyaran rupiah telah dibelanjakan untuk membiayai para demonstran bayaran. Salah seorang penyandang dana aksi demo bayaran tersebut, Dion Hardi Dirut PT Mampang Nugraha Prima milik Tommy Soeharto, mengaku telah mengucurkan dana 12 milyar rupiah untuk membiayai demo anti-K.H. Abdurrahman Wahid.¹⁸

¹⁸*Ibid*, Hal. 72-73